



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI JAWA TIMUR
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 18-20 NOVEMBER 2020**

*

**

**

*

JAKARTA 2020



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI JAWA TIMUR
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 18-20 NOVEMBER 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Oktober 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 10 November 2020.

B. RUANG LINGKUP

Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur merupakan rangkaian kerja dan tugas DPR RI dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan Pemerintah di sektor pangan dan pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan. Disamping itu, kunjungan spesifik ini merupakan tugas DPR RI dalam meninjau potensi daerah yang memiliki peluang untuk dikembangkan melalui program dan anggaran kementerian di tahun selanjutnya.

C. TUJUAN

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk:

1. Bidang Pangan dan Pertanian
 - a. meninjau dan melakukan pertemuan dengan pemilik pabrik pengolahan porang di Madiun.
 - b. melakukan pertemuan dengan petani porang Madiun.
2. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. meninjau secara langsung kondisi fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo.
 - b. meninjau secara langsung pengembangan pelabuhan.
 - c. mendengarkan secara langsung tantangan, kendala, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh PPP Mayangan.
3. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. meninjau secara langsung kondisi lingkungan sekitar dan fasilitas pengolahan limbah PLTU Paiton.
 - b. meninjau secara langsung dampak pencemaran lingkungan oleh PLTU Paiton.
 - c. mendengarkan secara langsung dari pengelola PLTU Paiton terkait kasus-kasus pencemaran lingkungan dan penanganan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
 - d. melakukan peninjauan ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Probolinggo.
 - e. melakukan inspeksi mendadak ke Kecamatan Sumobito terkait dengan pencemaran limbah B3/pembuangan limbah slag almunium yang dijadikan timbunan jalan dan urugan pondasi bangunan.
 - f. meninjau secara langsung industri rumah tangga pengolahan limbah slag almunium.
 - g. mendengarkan secara langsung dari dinas pertanian Kabupaten Jombang hal penanganan urugan limbah slag almunium di lahan pertanian.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan kerja spesifik pada Masa Sidang II Tahun 2020-2021, Komisi IV DPR RI membagi 3 Tim ke 3 Provinsi, diantaranya Jawa Timur, Banten, dan NTT. Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dengan susunan anggota tim sebagaimana terlampir.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2020.

F. LOKASI KUNJUNGAN

1. PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo.
2. Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo.
3. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo.
4. Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
5. Pabrik Pengolahan Porang Desa Kuwu Kecamatan Balarejo Kabupaten Madiun.
6. Pertemuan dengan Petani Porang di Pendopo Kabupaten Madiun.

G. GAMBARAN UMUM LOKASI YANG DIKUNJUNGI

1. Pencemaran Limbah di PLTU Paiton Kabupaten Probolinggo



PLTU Paiton merupakan PLTU terbesar di Asia Tenggara yang memiliki kapasitas daya 4.710 Mw. Di dalam kompleks PLTU Paiton yang memiliki

luas 400 hektar terdapat 9 unit pembangkit yang di operasikan oleh PLN dan swasta.

Unit	Pemilik	Kapasitas (MW)
1	PT Pembangkit Jawa Bali (anak usaha PT PLN)	400
2	PT Pembangkit Jawa Bali (anak usaha PT PLN)	400
3	PT Paiton Energy	800 (super critical boiler)
4	PT Paiton Energy	
5	PT Jawa Power (Siemens, YTL Int, Marubeni, BTI)	610
6	PT Jawa Power	610
7	PT Paiton Energy	615
8	PT Paiton Energy	615
9	PT Pembangkit Jawa Bali	660 (subcritical)
	Total	4.710

Selain menghasilkan listrik untuk kebutuhan Jawa-Bali, PLTU Paiton juga menghasilkan limbah yang dapat mencemari udara, laut (perairan), dan tanah. Tahun 2017, limbah B3 di Provinsi Jawa Timur sebesar 170 juta ton, 153 juta ton diantaranya dihasilkan oleh PLTU Paiton. Upaya yang dilakukan oleh PLTU Paiton untuk mengurangi dampak pencemaran Limbah B3 adalah dengan menggunakan teknologi mutakhir, salah satunya adalah *boiler super critical* yang memiliki efisiensi lebih tinggi dari *boiler sub critical* karena memiliki kemampuan menghasilkan energi panas yang sama dengan bahan bakar yang sama pula. Disamping itu, penggunaan *boiler super critical* memiliki emisi gas buang CO₂ relatif lebih rendah daripada *boiler sub critical*.

PLTU Paiton khusus PJB Unit 1 dan 2 telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan dalam memanfaatkan limbah B3 yang dihasilkan, diantaranya:

Kode	Nama Limbah	Satuan	Dihasilkan	Dikelola	Disimpan di TPS LB3	Belum dikelola	Keterangan
A102d	Aki/Baterai Bekas	Ton	1,4015	1,4015	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
A106d	Limbah dari Labpratorium yang mengandung B3	Ton	0,1060	0,1060	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3

Kode	Nama Limbah	Satuan	Dihasilkan	Dikelola	Disimpan di TPS LB3	Belum dikelola	Keterangan
A108d	Limbah terkontaminasi B3	Ton	0,1330	0,1330	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Ton	0,0279	0,0279	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
B104d	Kemasan Bekas B3	Ton	2,8800	2,8800	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
B105d	Minyak peluas bekas	Ton	34,810	34,8100	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
B106d	Limbah resin atau penukar ion	Ton	0,1320	0,1320	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Ton	0,4407	0,4407	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
B110d	Kain Majun bekas (Used Rags) dan yang sejenis	Ton	1,1560	1,1560	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
B409	Fly Ash	Ton	114.660,8640	114.660,8640	0	0	Diserahkan ke pihak ke-3
B410	Bottom Ash	Ton	141.920,9591	141.920,9591	0	0	Ditimbun sesuai dengan ketentuan

(periode Juni 2019 sd Juli 2020)

Walaupun kegiatan penanganan limbah B3 oleh PLTU Paiton sudah dilakukan, masih terdapat beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran limbah B3, diantaranya:

- a. Kerusakan terumbu karang dan penurunan tangkapan ikan. Terumbu karang di sekitar Pantai Desan Binor tampak mati yang mengakibatkan turunnya jumlah tangkapan ikan oleh penduduk Desa Binor.
- b. Pencemaran debu batu bara ke pemukiman, Desa Binor adalah desa yang terdekat dengan PLTU Unit 9, warga mengeluhkan debu dari cerobong PLTU terutama saat PLTU berhenti dan memulai kembali operasi. Selain itu, warga mengeluhkan debu batu bara yang berasal dari tempat penyimpanan batu bara yang dekat dengan pemukiman.

2. Perkembangan Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo



Sejarah Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo mulai didirikan pada tahun 2000 ketika Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Mayangan dibangun dengan gabungan dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Probolinggo serta dana luar negeri. Status PPI ini kemudian meningkat

menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai di tahun 2004 dengan nama Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan (UPPPP Mayangan) dan pada tanggal 23 Mei 2014, Gubernur Jawa Timur menetapkan UPPPP Mayangan berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan (UPT PP Mayangan).

Tujuan awal dibangunnya Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo adalah untuk menampung dan melayani aktivitas perekonomian berbasis perikanan yang dilakukan oleh nelayan, baik pendatang maupun nelayan asli Kota Probolinggo. Sebelum berdirinya Pelabuhan Perikanan Mayangan, aktivitas perikanan tangkap di Kota Probolinggo dilaksanakan di beberapa pemukiman nelayan yang tersebar di penjuru kota serta dengan memanfaatkan Pelabuhan Umum dan Niaga Tanjung Tembaga sebagai pusat pendaratan ikan.

Permasalahan PPP Mayangan kegiatan perikanan yang bercampur dengan aktivitas kepelabuhanan umum sangat tidak sesuai dengan prinsip sanitasi dan higienitas, sehingga muncul ide untuk memfasilitasi kegiatan penangkapan ikan di Kota Probolinggo dengan cara membangun sebuah pelabuhan perikanan yang representatif sehingga dapat tercapai tujuan bersama untuk;

- a. Menyediakan fasilitas pelabuhan yang mendukung operasional kapal perikanan;
- b. Meningkatkan mutu dan kuantitas hasil perikanan;
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta penyerapan tenaga kerja;

- d. Meningkatkan peran serta pelabuhan perikanan sebagai fasilitator pada sektor perikanan.

Sasaran yang akan dicapai;

- a. Meningkatnya fasilitas pelabuhan yang sesuai dengan masterplan;
- b. Meningkatkan peran aktif pelayanan umum pada pengguna jasa fasilitas pelabuhan;
- c. Mendukung upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (usaha penangkapan ikan yang illegal, tidak tercatat, dan tidak sesuai aturan);
- d. Memfasilitasi peran investor lokal maupun nonlokal yang akan mengembangkan usaha di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo;
- e. Mengadakan sosialisasi usaha perikanan dan pelelangan ikan di TPI.

3. Perkembangan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Probolinggo



Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terletak di Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang dengan luas areal 50.276,2 Ha.

Permasalahan yang terjadi di TNBTS adalah: terjadinya *mass tourism* pada beberapa lokasi (laut pasir, penanjakan, bukit cinta); degradasi potensi SDA dan objek daya tarik wisata alam; penataan pelaku jasa wisata (transport, PKL, dll); serta ekowisata belum terjadi secara optimal.

4. Pencemaran Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Wilayah di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben telah dikenal sebagai sentra industri kecil peleburan slag aluminium sejak tahun 1970. Bahan baku slag aluminium adalah limbah dari industri-industri di sekitar Jawa Timur bahkan Tangerang dan Banten. Slag aluminium juga dimanfaatkan warga untuk material timbunan/urugan jalan dan tanggul. Setelah keluarnya UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

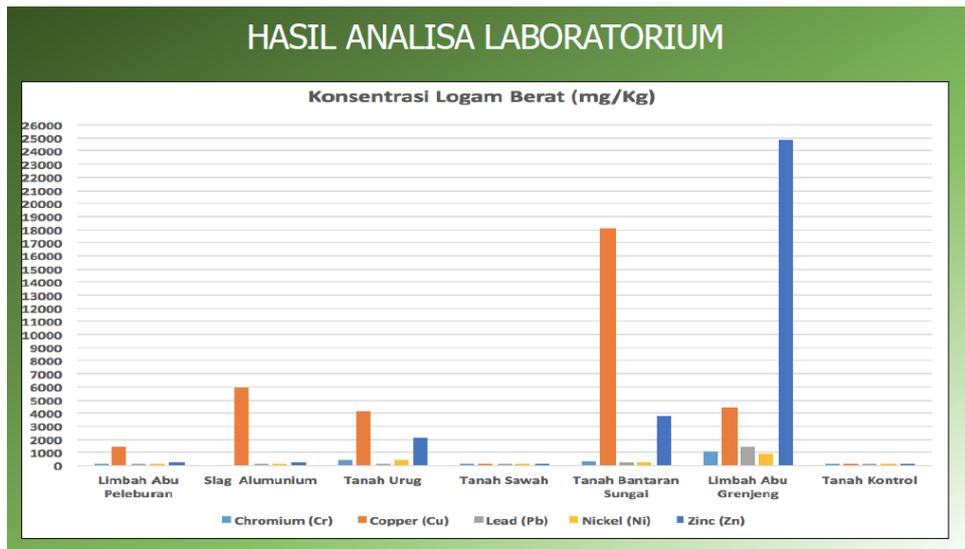
Pengelolaan Lingkungan Hidup, slag aluminium dikategorikan sebagai limbah B3 yang memiliki kode B313-2 dalam daftar limbah B3 dari sumber spesifik proses produksi primer dan sekunder berdasarkan PP 101/2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Tercatat sampai tahun 2014, terdapat 136 perusahaan yang beroperasi melakukan peleburan slag aluminium. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan cara pembinaan perizinan dan penegakan hukum hingga jumlah perusahaan tersebut mengalami penurunan menjadi 65 perusahaan aktif. Usaha peleburan slag aluminium menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan Perda Nomor 21 Tahun 2019 yang mengatur tentang zona khusus terbatas untuk kegiatan daur ulang slag aluminium.

Sumber Limbah

Slag aluminium adalah produk samping yang dihasilkan dari proses peleburan aluminium. Limbah slag berasal dari industri velg, industri perakitan kendaraan bermotor, dan industri peralatan rumah tangga. Bahan baku limbah aluminium berasal dari kawasan Industri di Jakarta, Semarang, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Mojokerto, dan Gresik serta pengepul sampah.

Kegiatan penanganan limbah slag aluminium telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Jombang dan Kementerian LHK, namun usaha peleburan aluminium masih dilakukan dan slag aluminium masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bahan dasar penyangga tanah di berbagai lokasi. Dampak dari penggunaan limbah slag aluminium yang sudah bertahun-tahun dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang, antara lain:

1. Pencemaran logam berat di tanah urugan, tanah sawah, bantaran sungai, dan limbah abu grenjeng, berdasarkan grafik terlihat bahwa konsentrasi logam berat terbesar di limbah abu grenjeng, tanah bantaran sungai, dan tanah urug.

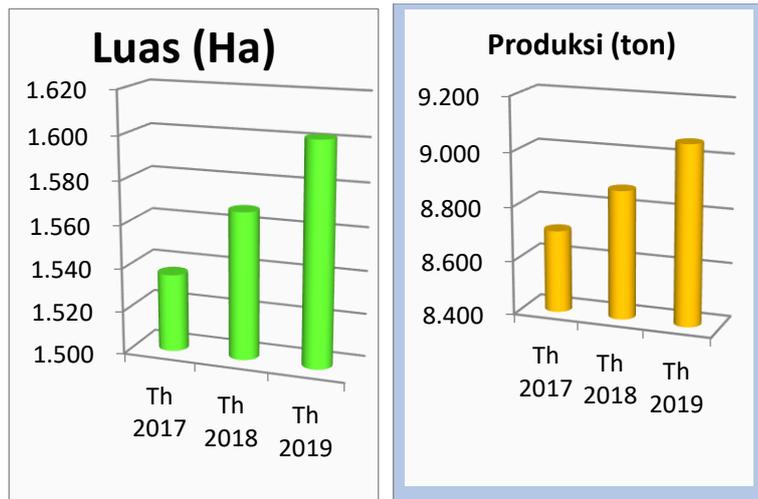


2. Pencemaran debu slag aluminium berdasarkan penelitian dinas kesehatan tahun 2016 menyebabkan gangguan pernafasan sedang sebagian besar responden (90,5 %), sedangkan sisanya mengalami gangguan pernafasan ringan.

5. Perkembangan Komoditas Porang di Madiun

Porang atau dikenal juga dengan nama iles-iles adalah tanaman umbi-umbian yang banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, pembuat lem, dan jelly yang beberapa tahun terakhir diekspor ke Negara Jepang, China, Taiwan, dan Korea. Tanaman porang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan karena potensi ekspornya masih sangat besar. Saat ini, porang masih banyak berasal dari hutan dan belum banyak dibudidayakan. Ada beberapa sentra pengolahan tepung porang saat ini, diantaranya di Pasuruan, Madiun, Wonogiri, Bandung, serta Maros.

Kabupaten Madiun, Jawa Timur berencana menjadikan Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, dan Madiun sebagai sentra budi daya tanaman porang dengan total luas sekitar 1.600 Ha. Kisaran harga jual bibit potang berkisar Rp350.000-RP400.000,00 per kilogram dengan bibit dari umbi dan katak.



Berdasarkan data, luas areal penanaman porang Tahun 2019 sebesar 1.602 Ha, sementara luas areal Tahun 2020 sebesar 5.252 Ha. Produksi umbi basah sebesar 9.060 ton dan berbentuk Chips sebesar 3.624 ton. Permasalahan utama yang sering dialami oleh para petani porang Kabupaten Madiun adalah ketersediaan dan harga bibit yang melambung tinggi.

II. KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

A. PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo

Komisi IV DPR RI telah melakukan peninjauan dan terdapat beberapa temuan di lapangan diantaranya:

1. Saluran pembuangan air panas/outlet dari PLTU Paiton terlalu dekat dengan pantai, akibat yang dikhawatirkan adalah kenaikan suhu air laut akan membuat terumbu karang mati atau *bleaching*.
2. PT PJB telah melakukan kegiatan-kegiatan penanaman mangrove di sekitar pantai serta menyalurkan dana CSR ke masyarakat sekitar.
3. PLTU Paiton setiap bulannya menghasilkan ratusan ton limbah B3 yang bisa dimanfaatkan oleh industri lain, namun limbah *bottom Ash* saat ini belum bisa di manfaatkan. Setiap harinya 70 ton limbah *bottom ash* dari 3 unit pembangkit listrik milik Paiton Energy.
4. Limbah *bottom ash* sejak berdiri PLTU Paiton saat ini ditimbun di areal penimbunan mencapai 1 juta ton dan belum ada teknologi yang memafaatkan limbah ini untuk keperluan yang bermanfaat bagi masyarakat dan ramah lingkungan.

5. Untuk memanfaatkan limbah *bottom ash*, pihak PLTU Paiton sudah melakukan kerjasama dengan Litbang Kementerian PUPR untuk dijadikan material bangunan seperti conblok dan campuran aspal;

Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Kasus kerusakan terumbu karang akibat tertabrak tugboat PG KSA-91 milik PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya (PT KSA) di perairan Karang Karanji Desa Bhinor Kec. Paiton, penyelesaian ganti ruginya dilakukan di luar pengadilan. Perusahaan sudah membayar ganti rugi kerusakan lingkungan ke kas negara sebesar Rp7,2 miliar dan ke masyarakat sebesar Rp466 juta.
2. Tumpahan batubara di perairan Bhinor Paiton, Kab. Probolinggo akibat tenggelamnya kapal tongkang PG Nautica 21 bermuatan batu bara milik PT Nusantara Tri Bahari. Saat ini kasus sudah ditangani oleh Dirjen Gakkum Kementerian LHK setelah diserahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada akhir Desember 2019.
3. Pengawasan dari Dirjen Gakkum terakhir dilakukan pada bulan September tahun 2019.

Tanggapan dan Rekomendasi Komisi IV DPR RI

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penegakan Hukum agar menindaklanjuti temuan-temuan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 dari PLTU Paiton dan segera melakukan langkah korektif.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan agar melakukan kegiatan monitoring berkala pencemaran di wilayah perairan terutama kesehatan terumbu karang serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Probolinggo untuk mengetahui tingkat kesehatan warga di sekitar PLTU Probolinggo.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan agar bekerja sama dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut c.q. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ikut aktif dalam penanganan pencemaran laut di sekitar PLTU Paiton.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pengelola PLTU Paiton, yaitu PT PJB, PT Java Energi, dan PT Paiton Energi agar melakukan langkah-langkah

kongkit dan teknologi mutakhir untuk menurunkan pencemaran udara, air, dan tanah

5. Komisi IV DPR RI meminta agar kepada Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK bekerja sama dengan pengelolaan PLTU Paiton untuk mencari solusi limbah *bottom ash* agar bisa dimanfaatkan kembali untuk bahan bangunan atau produk-produk lain yang ramah lingkungan.

B. Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo

Komisi IV DPR RI telah melakukan peninjauan dan dialog langsung bersama Dirjen PSDKP, wakil bupati, serta pelaku perikanan/petani dan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Kondisi pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum (niaga) masih di satu lokasi, sehingga memungkinkan pencampuran barang-barang umum dan tangkapan nelayan menjadi tidak higienis;
2. Banyaknya kapal di bawah 30 GT dan beberapa 30 GT di PP Mayangan;
3. Adanya masukan dari ketua rombongan bahwa perlu penataan semua hasil perikanan dan pertanian bisa langsung dikirim (akses) ke kota Jakarta atau kota lainnya; dan
4. Kolam tambat labuh yang masih kecil sehingga tidak dapat menampung seluruh kapal perikanan penangkapan ikan.

Penyerahan Bantuan Dana Pinjaman kepada Nelayan oleh Dirjen PSDKP disaksikan oleh Komisi IV DPR RI

1. Pokdakan Tambak Dungun/Kab. Probolinggo/120Juta/Budi Daya Bandeng;
2. Moch. Nauval/Kec. Mayangan/Kota Probolinggo/300 Juta/Pemasar Ikan;
3. Poklahsar Permata Jaya Pemasar Ikan Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo 500 Juta; dan
4. Poklahsar Primadona Pengolah dan Pemasar Rajungan Desa Sumberasih Kec. Banjarsari Kab. Probolinggo Rp500 Juta.

Masukan dari Nelayan

1. Adanya pungutan selain pembayaran yang dibebankan dengan pembayaran lainnya, seperti biaya sebelum diangkut ke kapal (jasa retribusi);

2. Perlunya pengerukan di PP Mayangan, sehingga kapal penangkapan perikanan dapat bersandar lebih banyak; dan
3. Adanya masukan untuk melakukan sosialisasi BP Jamsostek (jaminan sosial dan keselamatan kerja) bagi nelayan.

Tanggapan dan rekomendasi Komisi IV DPR RI

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap berserta Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dapat melakukan koordinasi terutama pelayanan di pelabuhan perikanan;
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap agar melakukan pendataan terhadap pendangkalan kolam tambat labuh di seluruh pelabuhan perikanan, baik di kewenangan pusat ataupun daerah;
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Budidaya agar dapat membina potensi para pembudi daya di Kota ataupun Kabupaten Probolinggo;
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi mengenai sekolah atau politeknik kelautan dan perikanan yang diberikan kepada anak-anak pelaku utama perikanan yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah-pemasar hasil perikanan, sehingga masa depan kelautan dan perikanan Indonesia semakin maju dan sejahtera;
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi bantuan dana pinjaman atau LPUMKP kepada seluruh pelaku utama perikanan, dengan harapan memutus mata rantai ketergantungan nelayan terhadap rentenir (lintah darat); dan
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar potensi hasil pertanian (pasar agro) di Kota/Kabupaten Probolinggo dapat langsung didistribusikan melalui koordinasi pelabuhan niaga dan pelabuhan perikanan.

C. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Probolinggo

Masukan dari Pemerintah Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Meminta dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Pusat dalam mengembangkan TNBTS dengan melakukan perbaikan tangga & kawah

Bromo, survei dan penataan awal jalur Kaldera, serta melakukan peningkatan kapasitas SDM.

D. Desa Bakalan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang

Komisi IV DPR RI berdialog langsung dengan Dirjen Gakkum, Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, Dinas Pertanian serta masyarakat sekitar dan menghasilkan beberapa informasi, diantaranya:

1. Slag aluminium yang tidak terpakai digunakan untuk urugan jalan dan galangan dekat dengan persawahan dan kebun jagung.
2. Limbah slag aluminium sudah menjadi mata pecaharian utama warga, mulai dari buruh angkut, usaha transportasi sampai industri kecil di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito.
3. Dirjen Gakkum sudah melakukan kegiatan penindakan atas perusahaan-perusahaan yang membuang limbah. 30 perusahaan sudah mendapatkan sanksi administratif, 2 orang ditetapkan menjadi tersangka dan sudah masuk persidangan, dan 13 orang masih dalam proses penyidikan.
4. Pemerintah Kabupaten Jombang sudah mendorong kegiatan revitalisasi peleburan aluminium dengan membentuk badan hukum berupa koperasi dan sentralisasi usaha peleburan di 2 lokasi yang ditunjuk.
5. Areal yang terkontaminasi sebanyak 118 titik dengan total luas lahan terkontaminasi kurang lebih 16.407,37 ha.
6. Kementerian LHK melalui Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, dan Dinas Pertanian telah melakukan pemulihan di beberapa titik timbunan limbah di Desa Kendalsari dan Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito.

Permasalahan terkait Penanganan Limbah B3 di Kecamatan Sumombito (pemulihan lahan terkontaminasi slag aluminium)

1. Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi ini adalah hal baru bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan untuk pemulihan oleh Pemerintah Daerah adalah yang pertama.
2. Terbatasnya pihak ketiga pengelola limbah B3 yang terdaftar dalam SIKAP (Sikap Infomasi Kinerja Penyedia).

3. Dibutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai tahap perencanaan, pengangkutan limbah B3, pengembalian fungsi lahan, dan pemantauan.
4. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap bahaya LB3, sehingga masih terus terjadi pembuangan ilegal.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemulihan lahan terkontaminasi, lebih memandang sebagai proyek besar.

Tanggapan dan Rekomendasi Komisi IV DPR RI

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penegakan Hukum agar memeriksa dan membuat BAP pelaku industri yang tidak berizin;
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penegakan Hukum agar melakukan penyidikan kepada perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja membuang limbah B3 ke Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 bekerja sama dengan semua pihak melakukan sosialisasi bahaya limbah slag aluminium dan melakukan memprioritaskan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi.

E. Peninjauan Pabrik Pengolahan Porang Desa Kuwu Kecamatan Balarejo Madiun dan Pertemuan dengan Petani Porang di Pendopo Kabupaten Madiun

Komisi IV DPR RI melakukan dialog langsung dengan pengusaha pengolah porang, Pemerintah Daerah, dan petani porang. Beberapa informasi yang diperoleh, antara lain:

1. Pabrik pengolahan porang dapat memproduksi 80 ton per hari yang diekspor ke China, Taiwan, Korea Selatan, dll.
2. Lahan yang cocok untuk ditanami umbi porang di ketinggian 300-800 mdpl (dikarenakan cuaca dan temperaturnya sangat mendukung). Umbi porang sangat baik ditanam di ketinggian 400-450 mdpl dengan memperhatikan kesuburan tanah, dll. Dalam 1 Ha dapat memproduksi 15 ton.
3. Berdasarkan informasi dari Badan Karantina Pertanian volume ekspor porang terbesar adalah ke China dengan total ekspor tahun 2020 (sampai dengan 12 Oktober 2020) adalah sebesar 8.675 ton. Hingga November

2020, nilai ekspor porang Indonesia ke sejumlah negara hampir mencapai Rp880 miliar.

4. Porang adalah komoditas baru yang dikembangkan sebagai pangan alternatif dan sasaran ekspor. Porang saat ini sebagai komoditas andalan di Madiun dan tahun 2020 telah dilepas benihnya yaitu varietas Madiun-1.
5. Kementan pada tahun 2020 telah memfasilitasi bantuan seluas 17.896 hektare (ha) meliputi kegiatan *pilot project* bibit seluas 30 ha dan pengembangan bantuan pupuk 17.866 ha. Pelaksanaan kegiatan di enam Provinsi meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Masukan dari Pemerintah Daerah serta petani porang Madiun:

1. Meminta dukungan Pemerintah dan Komisi IV DPR RI untuk sertifikasi varietas porang di Madiun.
2. Saat ini petani porang belum teralokasi pupuk bersubsidi sehingga meminta dukungan dari Pemerintah untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi bagi petani porang di Madiun.
3. Harga katak per kg Rp300.000,00 - Rp350.000,00.

Tanggapan Pemerintah Pusat

1. Pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada petani porang di Kabupaten Madiun senilai Rp15 Miliar dan diharapkan dilanjutkan dalam bentuk KUR karena Pemerintah akan fokus ke wilayah lainnya.
2. Porang sudah diekspor ke 16 negara, seperti China, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, dll. nilai ekspor komoditas porang di bulan Oktober-November 2020 senilai 19.800 ton, naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu dengan nilai hampir Rp88 Miliar.
3. Diharapkan porang jangan dijual dalam bentuk mentah dikarenakan porang dapat diolah menjadi 21 jenis produk diantaranya bahan pangan, farmasi, suplemen, emulsion, tekstur, diabetes, antiobesitas, antiaging, antikolesterol, dll. Diharapkan porang tetap dikembangkan.

Tanggapan dan Rekomendasi Komisi IV DPR RI

1. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran pengembangan komoditas porang melalui bantuan bibit, pupuk, koordinasi, dan

sinkronisasi dengan Kementerian Pertanian agar budi daya porang dapat berkembang.

2. LMDH belum tercover untuk pupuk bersubsidi dikarenakan jika petani porang dibantu untuk pupuk bersubsidi maka diharuskan mengubah Permentan. Beberapa lahan tumpang sari di lahan Perhutani juga belum menikmati pupuk bersubsidi.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah harus memberikan pelatihan kepada pemuda agar dapat meningkatkan petani millennial.
4. Komisi IV DPR RI akan mengkaji keefektifan pupuk bersubsidi dibandingkan dengan subsidi output.

III. KESIMPULAN

A. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penegakan Hukum agar menindaklanjuti temuan-temuan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 dari PLTU Paiton dan segera melakukan langkah korektif.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan agar melakukan kegiatan monitoring berkala pencemaran di wilayah perairan terutama kesehatan terumbu karang serta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Probolinggo untuk mengetahui tingkat kesehatan warga di sekitar PLTU Probolinggo.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan agar bekerja sama dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut c.q. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ikut aktif dalam penanganan pencemaran laut di sekitar PLTU Paiton.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penegakan Hukum agar memeriksa dan membuat BAP pelaku industri yang tidak berizin;
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penegakan Hukum agar melakukan penyidikan kepada perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja membuang limbah B3 ke Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 bekerja sama dengan semua pihak melakukan sosialisasi bahaya

limbah slag aluminium dan memprioritaskan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi.

B. Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap agar melakukan pendataan terhadap pendangkalan kolam tambat labuh di seluruh pelabuhan perikanan, baik di kewenangan pusat ataupun daerah.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Budidaya agar dapat membina potensi para pembudi daya di Kota ataupun Kabupaten Probolinggo.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi mengenai sekolah atau politeknik kelautan dan perikanan yang diberikan kepada anak-anak pelaku utama perikanan yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam serta pengolah-pemasar hasil perikanan, sehingga masa depan kelautan dan perikanan Indonesia semakin maju dan sejahtera.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi bantuan dana pinjaman atau LPUMKP kepada seluruh pelaku utama perikanan, dengan harapan memutus mata rantai ketergantungan nelayan terhadap renternir (lintah darat).

C. Kementerian Pertanian

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar potensi hasil pertanian (pasar agro) di Kota/Kabupaten Probolinggo dapat langsung didistribusikan melalui koordinasi pelabuhan niaga dan pelabuhan perikanan.
2. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran pengembangan komoditas porang melalui bantuan bibit, pupuk, koordinasi, dan sinkronisasi dengan Kementerian Pertanian agar budi daya porang dapat berkembang.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, seluruh aspirasi dan tanggapan dari seluruh pihak akan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan

mitra Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja spesifik ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya untuk masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Jakarta, 23 November 2020

Ketua Tim,

Ttd.

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.

A-375

LAMPIRAN MEDIA CETAK

1. <https://probolinggakab.go.id/kunker-spesifik-komisi-iv-dpr-ri-pantau-lingkungan-kerja-komplek-pltu-paiton/>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30708/t/javascript;>
3. <https://industri.kontan.co.id/news/dpr-belum-ada-solusi-tepat-atasi-timbunan-limbah-pltu-paiton>
4. <https://jatimnet.com/komisi-iv-dpr-ri-temukan-persoalan-limbah-hingga-rencana-pengembangan-pelabuhan-di-probolinggo>
5. <https://koranpantura.com/politik-dan-pemerintahan/8170/hasan-aminuddin-minta-kkp-bantu-modal-nelayan/>
6. <https://probolinggakab.go.id/v4/komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunker-spesifik-di-pelabuhan-perikanan-pantai-mayangan/>
7. <https://suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/5fb5289050ec4/perhatikan-kesejahteraan-nelayan-komisi-iv-dpr-ri-bakal-beri-reward-pemprov-jatim>
8. <https://faktualnews.co/2020/11/18/kunjungi-probolinggo-waket-komisi-iv-dpr-ri-minta-kuota-anak-nelayan-kuliah-di-poltek-kkp/243489/>
9. <https://jatimnet.com/komisi-iv-dpr-ri-temukan-persoalan-limbah-hingga-rencana-pengembangan-pelabuhan-di-probolinggo>
10. <https://www.bangsaonline.com/berita/83555/tingkatkan-produktivitas-tanaman-porang-%E2%80%8Bpetani-madiun-dapat-gerojokan-dana-rp-15-miliar>
11. <https://beritanasional.id/komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-pabrik-pengolahan-poran-di-kabupaten-madiun/>
12. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/qk3mip423/komisi-iv-dpr-dukung-kementan-kembangkan-porang>
13. <https://www.solopos.com/tembus-pasar-ekspor-transaksi-porang-tembus-rp880-miliar-1093167>
14. <https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2020/11/20/ekspor-melejit-komisi-iv-dpr-ri-dukung-kementan-kembangkan-porang>
15. <https://www.dekadepos.com/ekspor-melejit-komisi-iv-dpr-dukung-kementan-kembangkan-porang/>

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Rombongan Komisi IV DPR RI melihat fasilitas ash disposal dan penelitian bottom ash untuk con block di PLTU Paiton Kabupaten Probolinggo



perikanan yakni nelayan, dengan total bantuan senilai Rp. 1.420 Milliar



Rombongan Komisi IV DPR RI melihat timbunan Slag Almunium



Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke pabrik pengolahan porang dan bertemu dengan petani porang di Pendopo Kabupaten Madiun

